LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021
BULAN FEBUARI DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Senin, 8 Maret 2021

B. Pimpinan Rakor

Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Para Kepala Bidang
2. Para Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Dinas
3. Para Kasi
4. Bendahara Pengeluaran
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu
6. Pejabat Verifikasi Pejabat Pengadaan Barang /Jasa

D. Notulis

Pelaksana Sub Bagian Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 11,45 %

b.Keuangan = 1.639.650.072 (7,96%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
Administrasi Keuangan							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.127.359.000			674.292.656		
1	Tambahan Penghasilan Pegawai	4.127.359.000	16,60	14,28	674.292.656	(2,32)	
Administrasi Umum							
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	14.500.000			0		
1	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.500.000	9,24	0	0	(9,24)	
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan							
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi							
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	547.018.000			0		

1	Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Perempuan Potensial dalam Proses Pengambilan Keputusan	547.018.000	1,11	0	0	(1,11)	Penjadwalan anggota DPRD oleh Sekretaris Dewan
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	12.286.000			0		
1	Pertemuan Need Assesmen Perempuan Kelompok Rentan	4.716.000	34	0,10	0	(33,90)	Kegiatan Maju ke Bulan Februari karena Hasil Pertemuan digunakan sebagai bahan penyusunan Draft Pergub Pencegahan
2	Alat Tulis Kantor	7.570.000	24,70	24,70	0	(0,00)	Untuk Mendukung Kegiatan yang sudah berjalan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak							
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	10.210.000			2.420.000		
1	Identifikasi, Koordinasi dan Penjangkauan Kelompok Keluarga Rentan	10.210.000	46,81	19,14	2.420.000	(27,67)	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi							
	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	196.579.000			13.500.000		
1	Penyediaan Layanan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Anak	196.579.000	22,62	10,08	13.500.000	(12,54)	
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE							
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal							

	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.481.379.000			10.955.000		
1	Pelayanan KB MKJP	1.481.379.000	3,71	2,17	10.955.000	(1,55)	Pelayanan di Kab/Kota masih dilaksanakan
	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	46.291.000			6.435.000		
1	Advokasi Penggerakan Program KB dengan Mitra Kerja	46.291.000	95,86	6,78	6.435.000	(89,08)	sudah dilaksanakan pemesanan ATK kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya SE Gubernur
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat							
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK							
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi							
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	238.917.000			7.070.000		
1	Penyusunan dokumen profil perempuan, profil anak, isu perempuan, isu anak dan analisis kekerasan	206.120.000	6,54	6,51	7.070.000	(0,03)	
2	Media KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender, pemenuhan hak anak serta pencegahan kekerasan thd perempuan dan anak	11.842.000	5,41	2,32	0	(3,09)	
3	Pengembangan aplikasi E-kekerasan	20.955.000	2,51	0	0	(2,51)	

Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :	12	0	0			

Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :	21	0	0			

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan

Adanya Deviasi minus Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam SSK Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dikarenakan masih Pandemi Covid19 sehingga masih dilakukan PPKM berdampak pada tidak terlaksananya Perjalanan Dinas Luar.

Upaya

Apabila kondisi sudah kondusif, sehingga memungkinkan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah.

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

Rencana Kegiatan di Bulan Maret sebagai berikut :

Sekretariat

1. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
8. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi.
2. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi.
3. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi.
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
5. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
6. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
7. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
3. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
4. Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

1. Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat
2. Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
3. Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE

1. Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2. Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja.

Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
2. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
3. Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi.

V. PENUTUP

Kesimpulan rapat koordinasi pengendalian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2021 diminta para Kabid/ Kasi/Kasubbag agar mencermati e-RKO sesuai Kertas Kerja masing-masing dan DPA masing-masing, serta pelaksanaan kegiatan waktu nya jangan di akhir bulan.
2. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, PPKom agar berkoordinasi dengan pejabat pengadaan barang/jasa guna kelancaran pelaksanaannya (kontrak konsolidasi ATK masih proses).
3. PPTK setiap selesai melakukan kegiatan segera mempertanggungjawabkan (SPJ), kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, paling lama 15 hari kerja setelah uang muka kerja/panjer diterima dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada PA/KPA.

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan Februari 2021, untuk menjadikan periksa.

Semarang, Senin, 8 Maret 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PERREMPUAN, PERLIDNUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELAURAGA BERENCANA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEREMPUAN DAN ANAK

Dra. RETNO SUDEWI, Apt,MSi,MM
NIP. 196811241993102001